

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai tindak tutur Presiden Yoon Seok Yeol dalam Deklarasi Darurat Militernya.

#### **5.1 Simpulan**

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dalam deklarasi darurat militer Presiden Yoon Seok Yeol terdapat 22 tindak tutur ilokusi yang terbagi ke dalam lima kategori menurut klasifikasi Searle (1979), yaitu Asertif (13 data), Direktif (3 data), Komisif (3 data), Ekspresif (1 data), dan Deklaratif (1 data). Dominasi tindak tutur asertif memperlihatkan bahwa Presiden lebih banyak menggunakan ujaran untuk menyampaikan klaim, fakta, serta legitimasi atas kebijakan darurat militer. Kehadiran tindak tutur komisif, direktif, ekspresif, dan deklaratif berfungsi sebagai penunjang dalam strategi komunikasi politik, meskipun porsinya lebih sedikit. Analisis makna dan fungsi pragmatik menunjukkan bahwa tindak tutur asertif berfungsi membangun realitas krisis dan memperkuat legitimasi kepemimpinan, direktif digunakan untuk mengimbau rakyat agar mendukung kebijakan, komisif menegaskan komitmen presiden dalam memberantas kekuatan anti-negara, ekspresif berfungsi menyampaikan penghargaan dan membangun kedekatan emosional dengan rakyat sedangkan deklaratif memiliki fungsi paling performatif karena secara resmi menetapkan status hukum negara menjadi darurat militer. Temuan ini menunjukkan bahwa tindak tutur dalam pidato politik tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga instrumen strategis dalam membentuk opini publik dan legitimasi kekuasaan.
2. Respons rakyat Korea Selatan terhadap deklarasi darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon Seok Yeol pada 3 Desember 2024 menunjukkan penolakan luas dan masif. Masyarakat sipil, partai oposisi, dan berbagai organisasi segera mengkritik keputusan tersebut

3. karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak-hak rakyat. Gelombang demonstrasi terjadi di berbagai kota besar, dengan ribuan warga turun ke jalan menuntut pencabutan kebijakan. Tekanan publik yang semakin kuat mendorong parlemen menggelar sidang darurat, hingga akhirnya memutuskan pemakzulan Presiden Yoon pada 14 Desember 2024. Putusan ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi pada 4 April 2025, menjadikan Yoon sebagai presiden dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah demokrasi Korea Selatan. Respons masyarakat tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem demokrasi Korea Selatan, legitimasi politik tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan eksekutif, tetapi juga oleh penerimaan rakyat dan mekanisme institusional.

## **5.2 Saran**

1. Diharapkan pada penelitian lanjutan dapat memperbanyak dan memperluas objek kajian ke jenis-jenis wacana politik lainnya, seperti debat parlemen, kampanye, atau wawancara media. Selain itu, penambahan analisis unsur paralinguistik seperti intonasi, gestur, dan ekspresi visual juga penting untuk memperkaya kajian tindak tutur secara pragmatis.
2. Dalam bidang pendidikan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pada mata kuliah pragmatik atau analisis wacana, terutama dalam kajian komunikasi politik.